Koran
Mimbar Umum
Tepercaya & Aktual
TERBIT SEJAK 6 NOVEMBER 1945

75 TAHUN 1945 - 2020

SENIN, 6 SEPTEMBER 2021
Harga Eceran
Rp. 3000,- (Dalam Kota)
Luar Kota + Ongkos Kirim
Berlangganan
Hub. (061) - 7330737
Terbit 12 Halaman | Tahun LXXVI No.197

TAK INGIN SIKAP PLIN-PLAN:

AJI Minta Jokowi Cegah Penyingkiran 57 Pegawai KPK

Jakarta, MIMBAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meminta Presiden Joko Widodo mencegah penyingkiran 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ((KPK) yang dinyatakan tak lulus dalma tes wawasan kebangsaan (TWK).

Setelah temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM tentang masalah di TWK, AJI menilai tak ada lagi alasan KPK untuk tidak mengangkat 75 pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Kata Ketua Umum AJI, Sasmito Madrim, dalam keterangan tertulis, Ahad, 5 September 2021 --dilansir laman tempo.co-- "Ketika hak asasi manusia disepelekan, hukum direndahkan dan ketidakadilan didiamkan, maka orang-orang patut bicara. Apalagi, mereka yang memiliki otoritas tertinggi."

SASMITO Madrim. (Foto dok int)

KE KANTOR AJI

Pada Jumat 3/9 lalu, perwakilan 57 pegawai KPK berkunjung ke kantor AJI Indonesia di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pegawai KPK dan Pengurus AJI Indonesia mendiskusikan temuan dua lembaga negara, yakni Ombudsman RI dan Komnas HAM RI, yang menyebut ada pelbagai pelanggaran dan siasat

■ *Bersambung ke Hal 11*

BADAI IDA TERJANG LOUISIANA:

Jay Breaux menyeka keringat dari matanya setelah hantaman Badai Ida yang menghancurkan rumahnya di Dulac, Louisiana. Ida menerjang pesisir Louisiana pada Minggu (30/8) sebagai badai Kategori 4, terkuat kelima yang melanda Amerika. Jumlah korban tewas akibat Badai Ida bertambah menjadi 12 orang pada Sabtu (4/9). (Foto AP)

UPDATE COVID-19

INDONESIA	SUMUT
Positif	Positif
4.129.020	98.822
Sembuh	Sembuh
3.837.640	77.103
Meninggal	Meninggal
135.861	2.438
Update Terakhir: 05-09-2021	Data Terakhir 05-09-2021

Kasus Aktif Turun 5 Ribu

10 RIBU ORANG SEMBUH

Jakarta, MIMBAR - Kasus positif virus corona bertambah 5.403 pada hari Ahad 5/9 kemarin. Penambahan itu membuat total kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 4.129.020 sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020 lalu.

■ *Bersambung ke Hal 11*

MUSLIM ARBI DUGA KUAT:

PPHN Alat Pemodal Proyek IKN Baru

Jakarta, MIMBAR - Wacana amandemen UUD 1945 melalui Pokok Pokok Haluan Negara (PPNH) terlihat memiliki hidden agenda atau agenda tersembunyi. Bisa jadi untuk menyelamatkan para cukong yang telah mengeluarkan modal banyak untuk pembangunan IbuKota Negara (IKN) baru.

Kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Ahad 5/9 --dilansir laman berita rmo.id-- "Soal wacana Amandemen UUD 1945, terlihat ada hidden agenda."

■ *Bersambung ke Hal 11*

PUEBI Kembali Dikukuhkan

Medan, MIMBAR - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Badan Bahasa, Kemendikbudristek), mengukuhkan kembali Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebagai pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0321/I/BS.00.00/2021.

■ *Bersambung ke Hal 11*

DIUMUMKAN PEKAN DEPAN:

Taliban Janjikan Pemerintahan Inklusif

KUASAI PENUH: Pasukan Taliban mengklaim telah menguasai penuh Afghanistan, termasuk Lembah Panjshir yang menjadi basis pasukan penentang kelompok itu pimpinan Ahmad Massoud. (Foto AFP/ cnni)

Jakarta, MIMBAR - Kepala kantor politik Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar (53-**foto**), mengatakan, kelompoknya akan bersikap inklusif (mengikutsertakan pihak lain) untuk pemerintahan Afghanistan yang baru.

Hal itu sebagai respons atas kekhawatiran sejumlah pihak, bahwa pemerintahan Taliban yang sekarang akan sama dengan pemerintahan Taliban dulu pada periode 1996-2001.

Kata Baradar --kelahiran Weetmak, daerah Rahwod Deh, provinsi Oruzgan-- dikutip laman tempo.co dari kantor berita Al-Jazeera, Ahad 5/9 kemarin, "Saya yakinkan bahwa kami berupaya untuk berubah dan memperbaiki hajat hidup warga Afghanistan."

Ia melanjutkan, "Kami akan bertanggung jawab terhadap semuanya, menghadirkan keamanan, karena hal tersebut penting untuk pertumbuhan ekonomi."

Baradar melanjutkan lagi, bahwa keamanan adalah faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi.

Tanpa keamanan dan kestabilan, ia menyakini warga Afghanistan tak akan terdorong untuk menggenjot pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut kabar yang beredar, Baradar akan menjadi kepala pemerintahan Afghanistan yang baru.

■ *Bersambung ke Hal 11*

Malaysia Heran Corona RI Turun Drastis

Lim Kit Siang. (Foto dok int).

Jakarta, MIMBAR - Malaysia heran mengapa kasus Corona di Indonesia menurun drastis, lebih cepat dibandingkan tren kasus di negaranya. Hal ini dutarakan salah satu politisi seniornya, yaitu pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP) Lim Kit Siang (80).

■ *Bersambung ke Hal 11*

Wartawati di Afghanistan

Oleh Dr A Rasyid, MA

SEBUAH artikel yang ditulis Felix Kuehn dengan tajuk "Taliban History of War and Peace in Afghanistan,' diketahui bahwa Taliban semakin kokoh berdiri setelah resmi menjatuhkan ibukota Afghanistan, Kabul pada tahun 1996.

Gerakan ini lantas tambah memantapkan instrumen yang ada, seperti kemampuan berperang, meningkatkan keuangan atau pendapatan dan kemampuan bernegosiasi.

■ *Bersambung ke Hal 11*

Al-Washliyah Launching "Jum'at Makan Gratis"

***Medan, MIMBAR** - Lembaga Amil Zakat (LAZ) Washliyah (Washal) meluncurkan program "Jum'at Makan Gratis" (JMG) sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan terhadap sesama.*

Kegiatan perdana telah dilakukan pada Jum'at 3/8 lalu di halaman Gedung Al-Washliyah Sumut di Jalan Sisingamangaraja, Medan.

*Hadir pada momentum itu, Ketua Pengurus Wilayah (PW) Al-Wasliyah Sumut Dr Dedi Iskandar Batubara **(foto)** dan Dewan Pengawas Syariah LAZ Washal Dr H. Milhan Yusuf, MA.*

Ahmad Riyansyah, ME., selaku Ketua LAZ Washal menyebutkan, kegiatan yang akan dilaksanakan setiap hari Jum'at itu diharapkan mampu mendorong penguatan silaturahmi dengan ummat.

"Semoga semakin erat silaturahim dan semakin terbuka hati masyarakat untuk bersedekah dan berzakat di Lembaga Amil Zakal Washliyah, " ucapnya.

PROSESI

Prosesi peluncuran program Jum'at Makan Gratis tersebut diawali dengan santap bersama para tamu undangan yang dilanjutkan dengan pembagian paket makanan kepada masyarakat yang melintas di depan kantor ormas Islam itu.

Ketua Pengurus Wilayah (PW) Al-Wasliyah Sumut Dr Dedi Iskandar Batubara SSos, SH,

■ *Bersambung ke Hal 11*

Alamat : Jln. Pancasila No. 2 Simpang Jln. Denai, Medan Sumut, Telp. (061) 733 0737, Fax (061) 733 2457, Email : mimbarumum@yahoo.com, mimbarumum_058@yahoo.co.id, mimbarumum99@gmail.com

Pemko Pusatkan Kegiatan Vaksinasi di Puskesmas

Medan, MIMBAR - Pemko Medan mempusatkan vaksinasi di masing-masing wilayah atau 41 Puskesmas yang ada di Kota Medan mulai Minggu (5/9/2021).

"Hal ini dilakukan karena tingginya animo masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi dan juga untuk mengurangi vaksinasi massal," ujar Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kantor Kecamatan Medan Johor.

Peninjauan vaksinasi dilakukan Wali Kota Medan didampingi Asisten Pemerintahan M Sofyan, Plt Kadis Kesehatan dr Mardohar, Kabag Tapem M Rasyid Ridho Nasution dan Camat Medan Johor Zul Fahri Ahmadi serta Kapus Medan Johor dr Marlina.

Dengan dipusatkannya vaksinasi di setiap Kecamatan, Bobby menargetkan 200 orang per hari akan mendapatkan pelayanan Vaksin.

Ia menambahkan, guna memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Kota Medan, Pemko Medan terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi bahkan kegiatan ini terus dilakukan secara masif.

Bobby mengatakan, dalam beberapa minggu terakhir ini jumlah pasokan vaksin di Kota Medan sedikit terhambat sehingga mengakibatkan intensitas pelaksanaan vaksinasi juga berkurang. Namun dengan jumlah vaksin yang ada saat ini pelaksanaan Vaksinasi akan terus dilanjutkan dan mempusatkan di puskesmas yang ada di masing-masing wilayah.

"Hari ini kita mengubah skema pelaksanaan Vaksinasi, dimana sebelumnya kita laksanakan massal, saat ini dilakukan secara lebih mikro agar lebih menjangkau ke masyarakat yang ada di wilayah guna mengurangi mobilitas masyarakat dan mengurangi vaksinasi massal," kata Bobby.

Kedepannya, Bobby menyatakan, jika stok vaksin tersedia dengan cukup, maka vaksinasi akan dilakukan secara lebih masif lagi dengan jangkauan sampai tingkat kelurahan maupun lingkungan. "Hal ini dilakukan untuk mendorong turunya kasus Covid-19 dan terbentuknya Herd Immunity masyarakat kota Medan," Sebut Bobby Nasution.

Sementara itu, Camat Medan Johor Zul Fahri Ahmadi mengungkapkan, kegiatan ini merupakan pencanangan vaksinasi secara mikro oleh Wali Kota Medan.

Dimana selama ini pelaksanaan vaksin dilakukan secara massal, namun kini dilakukan secara mikro untuk menghindari kerumunan serta tempat lebih dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain itu juga karena antusias dari masyarakat, maka pelaksanaan vaksinasi ini digelar secara serentak di 41 puskesmas se Kota Medan.

"Karena puskesmas kita dalam tahap renovasi, jadi pelaksanaanaan vaksin di pusatkan di Aula Kantor Camat Medan Johor. Alhamdulillah sampai dengan jam 12.30 wib tadi, awalnya target kita 100 vaksinasi namun sudah mencapai 110 orang yang terdaftar. Masyarakat yang ingin melakukan vaksin pertama dan kedua silahkan datang ke puskesmas terdekat," jelas Camat Medan Johor.

Camat Medan Johor juga mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Medan Johor, agar terciptanya herd immunity, masyarakat diharapkan dapat

Malaysia Heran...

Dari Halaman 1

Dikutip dari Malaymail, Sekjen Partai DAP itu mempertanyakan hal ini kepada Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin. Ia menegaskan jika vaksinasi bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah Corona di Malaysia."Bisakah menteri kesehatan yang baru, Khairy Jamaluddin, menjelaskan mengapa selama 16 hari berturut-turut, Indonesia telah mengurangi kasus baru Covid-19 hariannya menjadi kurang dari Malaysia, bahkan kurang dari setengah seperti kemarin 8.955 kasus menjadi 20.988 kasus Malaysia?" kata Lim --kelahiran Batu Pahat, Johor, dilansir laman detikcom.

"Ini bukan mencari-cari kesalahan, tetapi mencari cara untuk meningkatkan penanganan kita terhadap pandemi Covid-19 sehingga memenangkan perang melawannya," tambah pemimpin DAP itu.

CATATAN LIM

Catatan Lim, Malaysia saat ini menjadi salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia terkait respons Covid-19. Kasus baru per satu juta penduduk berada di 572,43 dibandingkan dengan Indonesia 37,40.

Sementara prevalensi di Filipina 126,95 dan 61,27 di Myanmar, menurut data Our World in Data per 1 September. Tak hanya itu, Malaysia juga menempati puncak kematian Covid-19 dengan 8,48 per satu juta orang.

Vietnam setelahnya, berada di posisi kedua dengan 8,19 insiden kematian harian. Sementara Indonesia adalah 2,36 masih berdasarkan laporan yang sama.

"Pada laju infeksi dan kematian saat ini, kami akan menembus angka 1,8 juta untuk total kumulatif kasus Covid-19 hari ini," kata Lim.

"Kami akan memecahkan angka dua juta untuk total kumulatif kasus Covid-19 dan memecahkan angka 20 ribu untuk kematian akibat Covid-19 ketika kami merayakan Hari Malaysia ke-58 pada 16 September 2021," tambahnya.

Malaysia dapat menyalip dua negara lagi, Irak dan Belanda, untuk menduduki peringkat ke-21 di antara negara-negara dengan total kumulatif kasus Covid-19 terbanyak, bergabung dengan 20 negara lain yang melaporkan lebih dari dua juta kasus Covid-19.

Sementara anggota parlemen Iskandar Puteri membandingkan keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah kasus hariannya, dengan mengatakan negara tetangga itu, meskipun populasinya lebih besar, telah berhasil mengurangi tingkat infeksi Corona jauh lebih cepat daripada Malaysia. **(dtc-js)**

AJI Minta...

Dari Halaman 1

penyingkiran pegawai KPK melalui pelaksanaan TWK. AJI juga mendorong Jokowi agar mengambil alih dan mengoreksi keputusan KPK. Ini momentum bagi Jokowi untuk membuktikan sikap konkret dukungan terhadap pemberantasan korupsi.

Dan menegaskan ketidaksetujuan TWK dijadikan 'alat' untuk mendepak pegawai yang justru berintegritas seperti yang pernah disampaikannya pada 17 Mei 2021.

Kata Presiden Jokowi saat itu, "Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi langkah-langkah perbaikan KPK, baik individu maupun institusi, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes."

Sasmito mengatakan Ombudsman dan Komnas HAM memiliki kewenangan terbatas. Tindak lanjut dari tangan Jokowi sebagai kepala negara, diuji melalui putusan ini.

Apakah bisa menjadi anutan tertinggi melawan korupsi, atau justru membiarkan para koruptor berutang budi padanya.

TAK INGIN SIKAP PLIN-PLAN...

Jika Jokowi tak segera mengambil sikap, Sasmito mengatakan, pantas jika publik terus menerus curiga dan mempertanyakan keseriusan ucapan kepala negara.

Karena itu, AJI pun mendesak Jokowi berpegang teguh pada komitmen awal, dan membuktikannya dengan sikap konkret menengahi polemik TWK pegawai KPK.

AJI juga berharap Jokowi memerintahkan KPK mengikuti rekomendasi Komnas HAM dan melaksanakan tindakan korektif yang diminta Ombudsman. Kata Sasmito, "Kami (AJI) tak ingin, sikap plin-plan membuat publik kian tak percaya dengan janji pejabat negara."

AJI

Aliansi Jurnalis Independen atau AJI adalah organisasi profesi jurnalis, didirikan oleh para wartawan muda Indonesia pada 7 Agustus 1994 di Bogor, Jawa Barat, melalui penandatangan suatu deklarasi yang disebut "Deklarasi Sirnagalih."

Organisasi ini didirikan sejak pembredelan tiga media --DeTik, Tempo, dan Editor-- pada 21 Juni 1994 dan didirikan sebagai upaya untuk membuat organisasi jurnalis alternatif di luar PWI (persatuan Wartawan Indonesia).

Sekitar tahun 1991, jauh sebelum pembredelan tiga media, terjadi pertemuan informal belasan jurnalis di Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan berbagai hal menyangkut kondisi pers Indonesia. Dalam pertemuan itulah, tercetus ide perlunya membentuk organisasi jurnalis alternatif yang benar-benar independen, di luar PWI.

Saat deklarasi di Sirnagalih, 1984, forum sepakat memakai kata "aliansi" dan bukan "persatuan," serta "jurnalis" dan bukan "wartawan" seperti yang sudah duluan ada sebelumnya. **(tempo.co/int-cp)**

PUEBI Kembali...

Dari Halaman 1

Penetapan kaidah bahasa melalui keputusan Kepala Badan Bahasa itu merupakan prosedur yang lebih ringkas, sederhana, dan singkat, sehingga hasil pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa dapat segera digunakan dan dimanfaatkan masyarakat.

"Penetapan ini dilakukan untuk menyikapi perkembangan bahasa dan kebutuhan pengguna bahasa, karena pemutakhiran kaidah bahasa harus direspons dengan cepat," sebut Kepala Badan Bahasa, Prof.H Endang Aminudin Aziz, MA, PhD, dalam siaran pers yang diterima Mimbar, kemarin.

RUJUKAN

Ia mengungkapkan pentingnya menerbitkan keputusan yang meneguhkan keberadaan PUEBI sebagai rujukan kebahasaan yang selama ini digunakan masyarakat luas.

Dalam Pasal 19 Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021, disebutkan, bahwa pada saat peraturan menteri ini berlaku, Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Yang jadi persoalan di masyarakat, muncul pertanyaan bagaimana nasib PUEBI dan pedoman mana yang berlaku sebagai rujukan setelah adanya Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 yang mencabut PUEBI terhitung mulai 28 Juli 2021? Karena, pencabutan ini juga dapat berdampak hukum bagi ahli bahasa yang merujuk pada PUEBI ketika memberikan keterangan," ungkapnya.

Hal itu, lanjutnya, kemudian menjadi perhatian di antara sebagian kalangan masyarakat yang selama ini menggunakan PUEBI sebagai salah satu rujukan kebahasaan.

"Penerbitan keputusan ini sesungguhnya untuk memfasilitasi para pengguna bahasa Indonesia supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Berdasarkan saran dari berbagi pihak, diberlakukanlah yang ada (PUEBI) terlebih dahulu. Nanti, jika ada tambahan-tambahan baru, perubahannya dilakukan pada kurun waktu selanjutnya," jelas Aminudin.

BERBAGAI TANGGAPAN

Menanggapi Keputusan Kepala Badan Bahasa tentang PUEBI itu, sejumlah kalangan mengungkapkan kegembiraan dan berterima kasih. "Ini sangat penting disimak bagi yang kerjanya mengedit, atau editor. Juga, para sastrawan yang dikenal sebagai pendukung bahasa yang militan," kata jurnalis dan sastrawan senior, Kurniawan Junaedhie.

Begitu juga dengan Asnidar dan Febri Mira Rezki, guru Bahasa Indonesia. Keduanya bersyukur, PUEBI muncul kembali.

"Saya sempat resah PUEBI dicabut, sebab kita jadi tidak ada pedoman untuk membelajarkan Bahasa Indonesia kepada anak-anak. Dengan begini, maka ada pedoman lagi dan Bahasa Indonesia tetap bermartabat," tutur guru dan pembina Sanggar Bahtera SMP Negeri 6 Medan ini.

Guru Bahasa Indonesia di MTsN 1 Aceh Tamiang, Febri Mira Rizki, mengakui, PUEBI sejauh ini sudah akrab di telinga peminat dan penikmat bahasa yang sebelumnya lebih familiar dengan sebutan EYD.

Tentu, adanya pedoman tersebut sungguh membantu penerapan yang berlaku mengenai bahasa yang baik dan benar. "Sebagai Guru Bahasa dan Sastra Indonesia, tentunya ilmu yang termaktub di dalam PUEBI sangat memengaruhi pengaplikasian dalam kinerja menjadi lebih baik, karena hal tersebut merupakan patokan agar apa yang ditulis menjadi lebih rapi dan sesuai KBBI," sebut alumni Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang pernah aktif menulis di Mimbar Umum ini.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara, Maryanto, juga bersyukur dengan adanya Keputusan Kepala Badan Bahasa tersebut. Menurutnya, ada beberapa hal menarik.

Pertama, terlihat ihwal PUEBI itu menjadi lebih dekat dengan masyarakat/pengguna bahasa Indonesia. Kedua, terlihat pengaturan penggunaan bahasa negara sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 lebih mudah terlaksana dengan adanya kewenangan pengaturan itu oleh lembaga kebahasaan tersebut. "Ketiga, ihwal tata aksara Latin itu juga membuat memori segar kembali akan ejaan van Ophuysen, yang tentunya turut membekali PUEBI.

Ophuysen melahirkan ejaan pertama bahasa Indonesia ketika berada di Padangsidimpuan, Sumatra Utara," katanya.

MANDAT

Kepala Badan Bahasa, E. Aminudin Aziz mengatakan, keputusan yang diterbitkannya merupakan upaya pelaksanaan mandat yang diberikan Mendikbudristek melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia.Permendikbudristek yang berlaku mulai 28 Juli 2021 tersebut memuat tata cara dan tahapan pembakuan dan kodifikasi serta pemutakhiran dan penyebarluasan hasilnya.

Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia tersebut berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.

Berkaitan dengan hal itu, katanya, PUEBI merupakan hasil pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa yang berupa tata aksara.

"Atas persetujuan Menteri, kodifikasi bahasa dilakukan oleh Badan Bahasa. Pembakuan dan kodifikasi kebahasaan terdiri atas berbagai bidang. PUEBI ini merupakan salah satu dari hasil pembakuan dan kodifikasi yang menyangkut tata aksara," ujar Aminudin.

Dalam Pasal 10 Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021, disebutkan bahwa pembakuan dan kodifikasi dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Untuk selanjutnya, semua hasil pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia yang lain akan diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

TAK ADA PERUBAHAN

Terkait perbedaan antara PUEBI sebelumnya dan PUEBI yang baru diterbitkan ini, Aminudin mengungkapkan bahwa pada dasarnya tidak ada perubahan yang signifikan pada PUEBI saat ini.

"Perubahannya, misalnya, baru pada penyempurnaan contoh-contoh. Contoh-contoh dalam bahasa daerah yang dalam PUEBI sebelumnya masih dicetak miring, kemudian tidak lagi dicetak miring karena kata tersebut sudah masuk sebagai bahasa Indonesia. Pada PUEBI yang diterbitkan tahun 2015, kata 'sowan' masih dicetak miring karena kata itu masih menjadi bahasa Jawa dan belum masuk KBBI. Sekarang kata 'sowan' tidak dicetak miring karena kata tersebut sudah masuk ke dalam KBBI," katanya.

Ia juga menuturkan, dalam setahun ke depan Badan Bahasa menargetkan penambahan yang signifikan terhadap PUEBI dengan melakukan mancadaya dari para pengguna bahasa, termasuk wartawan, agar dapat memberikan pemikiran atas hal-hal yang perlu diatur di dalam PUEBI.

Badan Bahasa akan lebih responsif terhadap segala perubahan terkait kebahasaan yang ada di masyarakat dengan menampung berbagai masukan dari banyak kalangan.

"Penyempurnaan ejaan akan dilakukan secara reguler sebagai cara kita untuk merespons perubahan-perubahan yang ada di masyarakat sebagai pengguna bahasa Indonesia dari berbagai bidang. Perubahan tersebut harus ditetapkan untuk menghindari kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Rujukannya pasti akan mengarah pada dokumen resmi," tambahnya. **(A-01)**

PPHN Alat...

Dari Halaman 1

Karena, kata Muslim, saat ini tidak ada hal mendesak, yang seharusnya dilakukan adalah menyelamatkan nyawa rakyat dengan penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19) yang tepat sasaran.

"Bukan pandemi sebagai alat legitimasi untuk kepentingan-kepentingan politis dan bisnis! Jadi saat ini pemaksaan amandemen tidak memiliki dasar dan urgensi untuk dilakukan," kata Muslim. Apalagi, kata Muslim, amandemen saat ini bermuara pada perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 2027.

KONYOL

Kata Muslim, tegas, "Ini konyol, rusak demokrasi dan khianati rakyat."

Ia menyambung, "Terlihat ada hal yang disembunyikan untuk kepentingan rencana bangun Ibu Kota Negara. Wong ekonomi morat-marit, utang mencekik, rakyat korban pandemi berjatuhan di mana-mana. Paksakan bangun Ibu Kota Negara?"

Ia masih menyambung, "Apalagi ada kekuatan modal dan konglomerasi oligarki di balik rencana itu? Itu berbahaya. Ibukota negara (IKN) untuk siapa? Kalau tetap dipaksakan pembangunan IKN dalam suasana saat ini, pasti bukan untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat. Tapi kepentingan pemilik modal. Dan PPHN hanya sebagai alat legalitas saja," **(rmol.id)**

Taliban Janjikan...

Dari Halaman 1

Ia akan didampingi Mullah Mohammad Yaqoob --anak pendiri Taliban, Mullah Omar-- dan Sher Mohammad Abbas Stanikzai sebagai pejabat senior.

FIGUR VITAL

Abdul Ghani Baradar sendiri adalah figur vital di Taliban. Ketika Taliban menguasai Afghanistan pada periode 1996-2001, ia menjadi deputi Menteri Pertahanan.

Ketika Taliban bertempur dengan Amerika dan koalisi utara, ia kemudian dipindahtugaskan menjadi Komandan Militer Senior.

Pada 2010, ia ditangkap di Pakistan dan dibebaskan pada 2018 untuk kemudian menjadi Kepala Kantor Politik Taliban. Sumber Taliban berkata, kepastian soal posisi Baradar akan diumumkan pekan depan.

Sejatinya, hal itu akan diumumkan pekan ini, namun pertempuran di lembah Panjshir menjadi fokus Taliban untuk saat ini.

Sebelumnya, sejumlah negara sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan begitu saja mengakui pemerintahan baru Taliban di Afghanistan. Pemerintahan Taliban baru akan diakui apabila mereka memenuhi janjinya untuk bersikap inklusif dan menghormati hak asasi warga, terutama perempuan.

KUASAI LEMBAH PANJSHIR

Laporan lain dikutip laman kompas.com dari kantorberita Perancis, AFP, menyebutkan, milisi Taliban mengklaim telah menaklukkan Lembah Panjshir, wilayah terakhir yang melawan kelompok tersebut.

Tiga sumber mengklaim kemenangan kelompok tersebut kepada kantorberita Inggris, Reuters pada Jumat 3/9 --dikutip laman kompas.com. Salah satu dari ketiga sumber itu menuturkan, dengan jatuhnya Panjshir, maka Taliban telah mengontrol Afghanistan secara penuh.

"Para pembuat onar telah dikalahkan dan Panjshir sekarang berada di bawah komando kami," kata seorang komandan Taliban.

Kendati demikian, Reuters mewartakan klaim kelompok tersebut sulit dibuktikan.

Sejak Kabul jatuh ke tangan Taliban pada 15 Agustus, Panjshir merupakan satu-satunya provinsi yang belum ditaklukkan kelompok tersebut. Panjshir terletak di lembah yang dikelilingi pengunungan, kokoh sebagai basis perlawanan. Di bawah komando Ahmad Massoud, ribuan milisi lokal dan mantan tentara serta pasukan khusus Afghanistan menggalang kekuatan untuk melawan Taliban.

Ahmad Massoud merupakan putra mendiang Ahmad Shah Massoud yang merupakan tokoh anti-Taliban dan anti-Soviet. Presiden sementara Afghanistan, Amrullah Saleh, juga berada di Panjshir dan ikut memimpin gerakan perlawanan melawan Taliban tersebut. **(tempo.co/kompas.com-cp)**

Al-Washliyah Launching...

Dari Halaman 1

MSP pada kesempatan itu mengingatkan pengelola LAZ agar menjalankan prinsip transparansi. "Prinsip transparansi akuntabilitas merupakan sesuatu yang mutlak karena orang menitipkan sebagian hartanya kepada LAZ Washal dengan harapan bahwa harta tersebut benar-benar dimaksimalkan bagi kepentingan ummat," ucapnya.

Dedi yang juga seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu mengaku mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak sekaitan program yang baru diluncurkan tersebut.

Dia kembali mengingatkan para amil (pengelola zakat) agar bekerja maksimal dalam menjalankan amanah.

"Insya allah dengan keikhlasan yang dilakukan akan berbuah baik bagi kepentingan ummat, " ucapnya.

Sementara itu, Dr H Milhan Yusuf, MA. selaku Dewas memaparkan tentang potensi zakat yang sangat besar.

*Potensi tersebut, katanya, akan memberikan manfaat besar jika dikelola dengan baik. Antara lain dengan menganut asas transparansi. **(02/rel)***

Kasus Aktif...

Dari Halaman 1

Merujuk data Kementerian Kesehatan, dari total kasus positif, sebanyak 3.837.640 di antaranya telah sembuh. Pasien yang sembuh bertambah 10.191 dari hari sebelumnya.

Sementara sebanyak 135.861 orang lainnya meninggal dunia. Pasien yang meninggal dunia usai terinfeksi virus corona bertambah 392 dari kemarin.

Kemudian kasus aktif atau pasien yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri turun 5.180 orang, sehingga menjadi 155.519. Jumlah ini turun drastis dibanding Juli 2021. Spesimen yang diperiksa 171.885 sampel.

TURUN

Pandemi virus corona melanda Indonesia setahun lebih. Lonjakan kasus tertinggi terjadi beberapa pekan setelah Idulfitri 2021 atau Juli lalu. Saat ini kasus mulai turun, baik angka kasus positif Covid-19 baru maupun pasien yang meninggal dunia. Keterisian rumah sakit pun juga menurun.

Penurunan tingkat penularan itu berimplikasi pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah hingga 6 September mendatang. Jumlah daerah yang menerapkan PPKM Level 4 ikut menurun lantaran tingkat penularan melandai.

Wilayah di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 4 tingkat provinsi, turun dari 7 menjadi 4 provinsi. Di tingkat kabupaten/kota juga turun menjadi 85 daerah. Wilayah yang menerapkan PPKM Level 3 juga turun, dari 234 menjadi 232 kabupaten/kota.

Kemudian, wilayah yang menerapkan PPKM Level 2 menjadi 68 dari semula 48 kabupaten/kota luar Jawa-Bali pada pekan sebelumnya. Lalu ada satu daerah yang menerapkan PPKM Level 1. Pekan lalu, tidak ada daerah yang menerapkan PPKM Level 1.

Sementara di Jawa Bali, daerah yang menerapkan PPKM Level 4 berkurang dari 51 menjadi 25 kabupaten/kota. PPKM Level 3 bertambah menjadi 76 kabupaten/kota. Daerah yang menerapkan PPKM Level 2 bertambah menjadi 27 kabupaten/kota. **(cnni)**

Wartawati...

Dari Halaman 1

Tidak hanya Kabul, Taliban juga berhasil menjangkau kota-kota lain yang berjarak puluhan kilometer dari Kabul dan membentuk sebuah komite atau departemen. Meskipun kinerja komite itu dinilai amat buruk, namun pembentukan awalnya memang difokuskan untuk kegiatan diplomasi internasional dan memberikan rasa nyaman serta keadilan bagi Taliban itu sendiri.

PAMOR Taliban meredup pada 2001, ketika adanya invasi tentara Amerika Serikat (AS) ke Afghanistan. Kekalahan Taliban dari tentara AS ini benar-benar memukul.

AS datang dengan segala fasilitas militer yang mumpuni, membuat Taliban kocar-kacir.

Selain itu, Taliban juga mulai kekurangan simpati dari beberapa pendukungnya.

Tetapi meskipun sudah 20 tahun digulingkan, Taliban tetap menunjukkan eksistensi dan perlawanannya. Hingga akhirnya pada Ahad, 15 Agustus 2021 lalu, Taliban berhasil menduduki istana kepresidenan di Kabul dan menguasainya.

KEMBALINYA kekuasaan Taliban di Afghanistan hanya dalam waktu singkat setelah selama dua dekade berlalu, telah membuat negara tetangga Afghanistan berebut mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan pandangan geopolitik yang berubah.

Banyak yang sedang dalam gejolak geopolitik saat ini, karena negara tetangga Afghanistan mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan rezim Taliban yang baru muncul.

Presiden Joe Biden pada bulan April lalu memerintahkan Pentagon menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan pada 11 September, yang secara efektif mengakhiri perang terpanjang Amerika. Ketika kehadiran militer Amerika Serikat berkurang, Taliban pun membuat kemajuan cepat di medan perang meskipun masih kalah jumlah dari militer Afghanistan.

Dalam beberapa pekan terakhir, kelompok tersebut telah merebut kota-kota besar dan ibukota provinsi sebelum memasuki ibu kota Kabul pada Ahad 22 Agustus 2021 dan menguasai istana presiden.

BERDASARKAN beberapa pemberitaan di berbagai media, kini Taliban berhasil menguasai Afghanistan pada Agustus 2021. Termasuk media CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Kompas.com, TV One, dan lain-lainnya.

Dalam beberapa pemberitaan di berbagai media tersebut, muncul beberapa spekulasi bahwa adanya kekhawatiran terhadap kekuasaan Taliban. Seperti yang diungkapkan oleh Leni Winarni, ia turut mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Afghanistan jika pemerintahan dipegang oleh Taliban.

Kekuasaan yang dipegang oleh Talibat saat ini, membuat para jurnalis wanita atau wartawati di Afganistan merasa khawatir karena gerak wartawati dibatasi.

Seperti yang dilansir di media Detik News. com menyatakan, bahwa Taliban berkuasa, jurnalis wanita Afghanistan mengaku dilarang bekerja. CNN Indonesia juga mengatakan bahwa wartawan perempuan kabur usai wawancara dengan jurubicara Taliban.

Media TvOneNews juga mengatakan bahwa Taliban menjadi ancaman bagi wartawam perempuan, sejumlah jurnalis wanita dilarang kerja. Seorang jurnalis wanita, Clarissa Ward, menyatakan, bahwa kehadirannya di istana keperesidenan sempat membuat suasana tegang.

Kehadirannya di sana langsung menciptakan ketegangan, mereka mengatakan kepadanya untuk berdiri di samping karena dia seorang perempuan.

Ward juga mengatakan, bahwa kejatuhan pemerintah Afghanistan ini telah menyebabkan perempuan Afghanistan tidak berani keluar rumah. Banyak perempuan Afghanistan mengkhawatirkan hidupnya ketika Taliban berkuasa.

Hal ini juga berlaku untuk jurnalis-jurnalis perempuan yang tinggal di Kabul.

DALAM konsep ajaran Islam, sesungguhnya wanita memang tidak memiliki kebebasan untuk keluar rumah, karena dikawatirkan akan banyak menimbulkan fitnah sebagaimana kita dengar dan saksikan di negara-negara yang membebaskan wanita bekerja dan keluar rumah tanpa didampingi muhrimnya. Perselingkuhan acapkali terjadi di negara-negara yang membebaskan wanita berkarir dan keluar rumah tanpa muhrim. Akibatnya, sering kali terjadi kejahatan lain yang menyertainya

Adalah pilihan tepat bagi pemerintahan Taliban yang tidak memperbolehkan wanita untuk bebas keluar rumah. Agar tidak menimbulkan fitnah dan kejahatan lainnya.

Lantik dan Kukuhkan 95 Pejabat Disdukcapil dan Dinas P2K

Bobby: Jangan Memperkaya Diri

Medan, MIMBAR - Wali Kota Medan Bobby Nasution melantik dan mengukuhkan sebanyak 95 orang pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemko Medan. Acara pelantikan tersebut digelar di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (3/9).

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, saat melantik sebanyak 95 orang pejabat struk-tural dan fungsional Pemko Medan di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (3/9). (Foto Mimbar/ Ist)

Adapun pejabat yang dikukuhkan merupakan pejabat struktural dengan jabatan Administrator dan Pengawas di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 15 orang, sedangkan pejabat yang dilantik merupakan pejabat fungsional di jajaran Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) sebanyak 80 orang.

Dengan mengenakan baju adat Melayu, Bobby melantik dan mengukuhkan ke 95 pejabat tersebut baik secara langsung maupun sambungan virtual, proses pelantikanpun berlangsung dengan khidmat.

Usai melantik, Bobby menyampaikan dua hal pentin. Pertama, tanggungjawab yang diberikan dan dipegang oleh pejabat harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya. Dimana bukan untuk memperkaya diri, menyenangkan diri dan keluarga dalam bentuk materi. Ia juga berpesan agar pejabat yang dilantik dan dikukuhkan dapat melayani masyarakat dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu.

"Terkhusus bagi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar melayani masyarakat selayaknya tanpa ada mengharapkan sesuatu dari yang kita layani. Karena kita tidak tahu yang kita layani ini, apakah dia lagi susah atau lagi senang. Karena yang saya tahu, dari agama manapun, tidak ada yang mengajarkan untuk kita mengambil harta orang yang lebih susah dari kita. Seharusnya kita yang lebih cukup secara materi memberi kepada mereka," kata Bobby.

Selanjutnya, yang kedua, Bobby berpesan kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemko Medan, agar terus berinovasi dengan mencari referensi dari kabupaten/ kota lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan hasil referensi yang didapat harus menjadi sebuah rangkuman.

"Saya ingin minimal dua minggu sekali atau satu bulan sekali bapak/ ibu merangkum, minimal dari lima kota dan kabupaten, baik dalam negeri ataupun dari luar negeri. Karena itu salah satu bagaimana kita mencari inovasi," ungkap Bobby seraya menyarankan agar para pejabat memanfaatkan teknologi yang ada melalui jaringan internet.

Pelantikan dan pengukuhan dengan penerapan protokol kesehatan ketat tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Kaban BKD&PSDM Zain Noval, Kepala Dinas P2K Albon Sidauruk, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zulkarnain. **(R/A-01)**

Wali Kota Medan Resmikan Ruang Isolasi Covi RS Adam Malik

Medan, MIMBAR - Wali Kota Medan Bobby Nasution meresmikan ruang isolasi Covid-19 milik RSUP H Adam Malik, Jumat (3/9). Ruangan berkapasitas 36 bed ini merupakan bantuan dari Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan.

Peresemian dilakukan Bobby bersama dengan Dirut RSUP H.Adam Malik Zainal Safri dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut Syafriel Tansier.

Usai meresmikan ruangan tersebut, Bobby Nasution mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan yang telah membantu Pemko Medan dalam penanganan covid-19 khususnya pada penanganan treatment.

"Kami mengucapkan terimakasih atas penambahan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada kami dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Medan untuk penyembuhan covid-19," kata Bobby yang hadir didampingi Plt Kadis Kesehatan Mardohar dan Plt Camat Medan Tuntungan Harry Indrawan Tarigan.

Meskipun ruang isolasi Covid-19 ini sudah dapat digunakan, namun Bobby berharap ruangan ini tidak digunakan. Artinya, Bobby tidak ingin ada lagi penambahan jumlah kasus Covid-19 di Kota Medan. "Saya berharap ruangan ini tidak terisi, karena yang mengisi disini pasti yang gejalanya sudah berat karena harus dirawat," harap Bobby.

Sementara itu, Dirut RSUP H. Adam Malik Zainal Safri menerangkan, sebelumnya total bed isolasi covid-19 di RSUP H Adam Malik sebanyak 250 bed dan hari ini ditambah 36 bed jadi totalnya mencapai 286 bed. Dengan begitu RSUP H Adam Malik sudah menyiapkan 36% dari total tempat tidur yang tersedia. "Dengan adanya penambahan bed ini jadi total BOR kita hari ini 32%, karena semakin banyak bed yang tersedia maka jumlah BOR kita pun semakin menurun," ujarnya.**(R/A-01)**

Pemko Medan Tetapkan Zonasi PKL

Medan, MIMBAR - Pemerintah Kota Medan akan segera menetapkan zonasi bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengatasi permasalahan penataan kota dan pemberdayaan PKL.Lokasi PKL dibagi menjadi tiga zona. Pertama, Zona Merah, yang merupakan lokasi bebas dari aktivitas PKL. Kedua, Zona Kuning, yang merupakan lokasi yang diizinkan bagi PKL untuk beraktifitas dengan beberapa syarat tertentu. Dan ketiga, Zona Hijau, yaitu lokasi yang diijinkan dan diperuntukan bagi PKL melakukan aktifitas dengan penataan pengelompokan jenis barang dagangan.

Menurut Wali Kota Medan Bobby Nasution, dengan sistem zonasi ini para PKL tetap dapat berdagang bahkan mendapatkan perlindungan serta sarana dan prasarana. Sebab, PKL merupakan aset dan bukan sebagai masalah perkotaan. Salah satunya dengan menggaungkan kawasan Kesawan sebagai "The Kitchen of Asia".

Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, dengan penetapan zonasi ini akan banyak manfaat yang akan diperoleh PKL. Misalnya, PKL akan terdaftar dan mendapatkan pelayanan tanda pengenal. Selanjutnya mendapatkan penataan dan pembinaan, mendapatkan perlindungan serta difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. "Banyak manfaat yang akan diproleh oleh PKL, mereka akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, selain itu juga mendapatkan pembinaan dan sarana dan prasarana yang nyaman untuk berdagang sehingga kita berharap PKL kita dapat meningkat perekonomiannya karena peraturan ini memberikan jaminan bagi PKL untuk berdagang," kata Benny Iskandar.

Dalam peraturan tersebut, salah satu pasalnya juga menyebutkan, dalam rangka pemberdayaan aktifitas PKL, Wali Kota Medan juga dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR). "Bentuk kemitraan dengan dunia usaha nanti itu dapat berupa penataan peremajaan tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan. Selain itu juga adanya promosi usaha dan event pada lokasi binaan," jelas Benny.

Halim, salah seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berdagang di Jalan Yos Sudaro, mengaku senang dengan adanya peraturan ini. Sebab PKL akan mendapatkan perlindungan dalam berdagang serta difasilitasi sarana dan mendapatkan pelatihan.

"Kalau saya sebagai pedagang, ya pasti senang, karena mendapatkan banyak keuntungan. Selama ini kan kami tidak pernah diperhatikan," ungkapnya. **(R/A-01)**

Bobby Dilantik sebagai Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kota Medan

Medan, MIMBAR - Wali Kota Medan Bobby Nasution dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Ka.Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Medan masa bakti 2020- 2025. Pelantikan dilakukan Ketua Kwartir Daerah (Ka.Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Sumut Nurdin Lubis di Halaman tengah Kantor Wali Kota Medan, Sabtu (4/9).

Wali Kota Medan Bobby Nasution dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Medan masa bakti 2020- 2025 di Halaman Kantor Wali Kota Medan, Sabtu

Tak hanya Bobby, sang istri pun, Kahiyang Ayu Bobby Nasution bersama Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman dan Wakil Ketua TP PKK Kota Medan Shaula Aulia Rachman juga dilantik sebagai Waka.Mabicab Gerakan Pramuka Kota Medan.

Pelantikan diawali dengan tanya jawab kesiapan dan pembacaan janji Pramuka Trisatya oleh Ketua Mabicab dan Wakil Ketua Mabicab serta anggota lainnya. Kemudian, sebelum penandatanganan naskah ikrar dan naskah pelantikan oleh Ketua Mabicab dan Ketua Kwarda Sumut, Bobby Nasution membacakan Ikrar sebagai Ketua Mabicab. Pelantikan ini diakhiri dengan penyematan tanda jabatan oleh Ka. Kwarda Sumut kepada Ka. Mabicab.

Selanjutnya, usai dilantik menjadi Ka. Mabicab Gerakan Pramuka Kota Medan, Bobby kemudian melantik M Husni SE sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan masa bakti 2020-2025. Pelantikan Husni yang juga menjabat Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan ini diawali juga dengan Pembacaan Janji Pramuka Trisatya, pembacaan ikrar dan penandatanganan naskah pelantikan serta penyematan tanda jabatan kepada Ka. Kwarcab oleh Ka. Mabiran Gerakan Pramuka Kota Medan.

Dalam sambutannya, Bobby mengungkapkan, dirinya menilai pembelajaran yang didapati dalam Gerakan Pramuka harus dapat dimaknai dan diimplementasikan pada kehidupan, khususnya dalam kondisi saat ini. Artinya, dalam Gerakan Pramuka diajarkan bagaimana cara untuk bertahan dalam semua kondisi dengan memanfaatkan peralatan yang dimiliki.

Bobby menambahkan, saat ini Indonesia mengalami kondisi bencana non alam, yakni Pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Tentunya ini merupakan kondisi yang sulit, namun sampai saat ini masyarakat dapat bertahan karena landasan Pramuka yang telah diajarkan. "Saya yakin, salah satu yang membuat kita masih bertahan karena landasan ajaran Pramuka yang diajarkan kepada kita, terkhusus di Kota Medan kita masih bisa bertahan akibat Pandemi Covid-19 adalah bukti adaptasi dari ajaran Pramuka. Saya juga berharap seluruh anggota Pramuka Kota Medan dapat mengajak seluruh masyarakat untuk dapat beradaptasi di masa Pandemi Covid-19," kata Bobby.

Bobby juga menjelaskan, kedepan Gerakan Pramuka Kota Medan melalui bidang-bidangnya dapat berkolaborasi untuk penanganan Covid-19. Artinya, ilmu yang didapati dalam gerakan Pramuka, salah satunya bertahan dan beradaptasi dengan kondisi apapun harus dapat diimplementasikan saat ini di masa Pandemi Covid-19.

"Kita kedepannya akan lebih menekankan ilmu kepramukaan kepada adik-adik dan anak- anak kita di setiap sekolah- sekolah," ungkap Bobby.

Selanjutnya Bobby mengucapkan terima kasih kepada Ka Kwarda Sumut yang telah melantik Mabicab Gerakan Pramuka Kota Medan. Selain itu ia juga berharap Pengurus Mabicab dan Pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan dapat menjalankan amanah dan tanggung yang diemban.

"Selamat kepada kita semua yang telah dilantik. Mudah-mudahan amanah dan tanggung jawab yang diberikan dapat menjadi ibadah bagi kita," sebut Bobby.

Dalam kesempatan itu, Ketua Kwarda Sumut Nurdin Lubis mengucapkan selamat kepada Wali Kota Medan atas amanah yang diterima sebagai Ka Mabicab Gerakan Pramuka Kota Medan. Diharapkannya, kedepannya Kota Medan dapat menjadi Kota Pramuka dan menjadi barometer Pramuka di Indonesia. "Selamat kepada Pak Wali, kita harapkan dapat menjadikan Medan sebagai Kota Pramuka," Kata Ka Kwarda Sumut Nurdin Lubis.

Sementara itu Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan M Husni SE mengungkapkan, setelah dilantik, seluruh pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Medan akan terus bergerak dan berkarya sesuai tagline nasional, yakni Berbakti Tanpa Henti. Sebagai gerakan moral, Pramuka harus terus berkarya membangun dan melahirkan anak bangsa yang berkarakter dan cerdas.

"Kami Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan akan saling berkolaborasi untuk mendukung dan mensukseskan program Wali Kota Medan dalam pembangunan menuju Medan Berkah. Kedepannya, sebagai tanggung jawab moral, Gerakan Pramuka Kota Medan akan melahirkan generasi muda yang berkarakter dan bermental kuat dengan melakukan pembinaan dan lebih mengaktifkan Gugus Depan Gerakan Pramuka di sekolah," urai Husni. **(R/A-01)**

Pemko Medan Perjuangkan UMKM Penuhi Kebutuhan

Medan, MIMBAR - Wali Kota Medan Bobby Nasution terus berupaya memperjuangkan agar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat menawarkan dan memasarkan produknya untuk mendukung kebutuhan Pemko Medan, yakni dengan mendorong Bank Sumut untuk mengeluarkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), dan meminta pelaku UMKM dipermudah untuk dapat masuk ke e-katalog lokal.

Menurut Bobby, KKPD merupakan salah satu instrumen pembayaran dalam Belanja Langsung (Bela) Pengadaan. Hal ini disampaikannya dalam rapat yang digelar Kementerian Koperasi dan UMKM secara daring, Jumat (3/9). Rapat yang digelar secara virtual tersebut juga diikuti oleh Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan, Asisten Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Santoso, Sekda Medan Wiriya Alrahman, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Edliaty, dan Kabag Pengadaan Barang Jasa Setdako Medan Topan OP Ginting.

Dalam rapat itu, Bobby mengatakan, saat ini Pemko Medan memberdayakan e-katalog Pemko Medan sebagai marketplace untuk penyediaan makan minum yang penyedianya berasal dari pelaku UMKM se-Kota Medan. Pemko Medan pun sangat mendukung program Bela Pengadaan tersebut.

Langkah-langkah yang telah dilakukan menuju Bela Pengadaan itu, antara lain membentuk Pokja Kolaborasi Percepatan UMKM Kota Medan on Boarding pada Bela Pengadaan dan mengidentifikasi serta memverifikasi pelaku UMKM yang akan on boarding pada Bela Pengadaan.

"Selain itu, Pemko Medan juga menyediakan data pelaku UMKM yang memenuhi syarat, yang tersebar di seluruh Kecamatan, serta melakukan MOU antara Pemko Medan dengan marketplace pada Bela Pengadaan," ucapnya Bobby seraya menyatakan, Pemko Medan juga menyusun kebijakan yang mendukung Bela Pengadaan.

Sementara, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk mendukung agar bank-bank pembangunan daerah dapat mengeluarkan KKPD. Dia mengatakan, Kementerian Keuangan telah mempunyai pengalaman soal Kartu Kredit Pemerintah.

Sedangkan Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setdako Medan Topan OP Ginting menambahkan, seharusnya e-katalog lokal bulan lalu telah selesai. Namun terkendala karena beberapa minggu lalu pihak LKPP melakukan upgrade sistem.

"Setelah upgrade sistem ada penambahan-penam ahan fitur yang menyulitkan bagi pelaku UMKM, karena ada tambahan input lagi yang sebelumnya tidak ada. Sehingga yang sudah kita input sebelumnya harus kita ulang lagi dari nol," ungkapnya. **(R/A-01)**

Direktur LBH Harapkan Forwakum Jadi Wadah Perjuangan Masyarakat

Medan, MIMBAR - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Ismail Lubis mengharapkan Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara (Sumut) bisa menjadi kontrol sosial dalam persoalan hukum yang menjerat masyarakat dengan tetap mengacu pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Pers.

Direktur LBH ini mengatakan, kemerdekaan pers merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Pers dalam aktifitasnya berfungsi sebagai media informasi, edukasi dan kontrol sosial.

"Pembentukan Forwakum Sumut diharapkan dapat menjadi sarana masyarakat untuk mengakses informasi, edukasi dan dapat membantu masyarakat dalam melakukan kontrol sosial khususnya dalam masalah hukum," kata Ismail kepada wartawan, Sabtu (4/9).

Ia menuturkan, sebagai media informasi, kedepan Forwakum Sumut harus bisa dijadikan referensi pemberitaan hukum yang baik oleh masyarakat, sarana edukasi dan tetap mengacu pada nilai-nilai kaidah jurnalistik dan UU Pers.

"Hendaknya setiap informasi yang disajikan dalam berita juga harus bisa memberi pelajaran hukum bagi masyarakat. Dalam peran edukasi ini menjadi penting karena harapannya degan teredukasinya masyarakat tentang hukum maka akan sempit ruang untuk terjadinya pelanggaran hukum terhadap masyarakat," imbuh Lubis.

Disampaikannya, sebagai kontrol sosial, peran ini harus betul-betul dimainkan oleh Forwakum Sumut mengingat banyaknya ditemukan pelanggaran hak masyarakat dalam proses hukum baik dikepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun instansi lainnya.

"Forwakum harus bisa menjadi wadah perjuangan bagi masyarakat. Artinya Forwakum harus bisa menyuarakan setiap permasalahan hukum yang terjadi melalui pemberitaan hukum yang kritis tentunya dapat menjadi alat perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Dari tiga peran tersebut, semoga Forwakum sumut tetap menjaga kaidah-kaidah jurnalistik dalam aktifitasnya," tukas Ismail Lubis, SH, MH. **(A-08)**